

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bonus demografi merupakan kekuatan penting dalam pertumbuhan ekonomi ( Croix et al, 2007). Hal ini dijelaskan oleh teori pertumbuhan Solow yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Sumber Daya Manusia, modal, dan teknologi. Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terutama melalui *Research & Development* (R&D) yaitu dengan menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara ( Mankiw, Romer, & Weil, 1992). Oleh karena itu dengan adanya bonus demografi, maka akan semakin banyak Sumber Daya Manusia yang akan menghasilkan berbagai inovasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. Meski demikian tidak cukup hanya dengan banyaknya sumber daya manusia, tetapi diperlukan pendidikan sebagai faktor tambahan agar pertumbuhan ekonomi meningkat (Bartik, 1997). Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan memiliki produktifitas yang tinggi. Sebaliknya dalam masyarakat yang memiliki pendidikan rendah, bonus demografi hanya akan menjadi beban bagi daerah tersebut.

Bonus demografi diartikan sebagai penurunan tingkat ketergantungan usia non produktif (muda dan tua) terhadap usia produktif (15 – 64 tahun) yang memberikan keuntungan ekonomis bagi suatu daerah. Semakin kecil tingkat ketergantungan maka semakin besar bonus demografi yang diperoleh hingga pada titik tertentu. Daerah yang lebih

banyak daripada usia non produktif. Bonus demografi di Indonesia menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan dialami pada tahun 2010 hingga tahun 2030.

Menurut Jurnal Susunan Pengurus East Java Economics (2018:14) jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) akan sangat menentukan jumlah angkatan kerja, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap *savings* dan *investment*. Lebih jauh, struktur demografi juga berpengaruh terhadap penerimaan negara dan belanja pemerintah untuk sektor publik. Semakin tinggi jumlah penduduk usia produktif maka potensi penerimaan negara akan semakin besar, demikian juga sebaliknya jika jumlah penduduk usia non produktif tinggi maka belanja pemerintah juga akan meningkat, khususnya untuk belanja kesehatan, jaminan sosial dan pendidikan. Tentu saja, pada akhirnya perubahan struktur demografi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk di Kota Tarakan sebanyak 244.185 jiwa di tahun 2016 yang terdiri atas 127.933 jiwa penduduk laki-laki dan 116.252 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015 Kota Tarakan mengalami pertumbuhan sebesar 3,66% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 3,75% dan pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 3,56%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110,05, yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 110 sampai 111 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2016.

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2016 mencapai 974 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk per rumah di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tarakan Barat dengan kepadatan sebesar 2.923 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 261 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Tarakan					
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
	2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
Tarakan Timur	43,29	52,35	54,27	25,37 %	3,66 %
Tarakan Tengah	61,05	73,84	76,54	25,37 %	3,66 %
Tarakan Barat	68,24	82,53	85,55	25,36 %	3,66 %
Tarakan Utara	22,2	26,85	27,83	25,36 %	3,66 %
<b>Tarakan</b>	<b>194,78</b>	<b>235,57</b>	<b>244,19</b>	<b>25,36 %</b>	<b>3,66 %</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Tarakan 2010-2020 (BPS)

Program KB wajib dilakukan di zaman Soeharto kepada seluruh pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Bila salah satu pejabat gagal menahan lonjakan penduduk di daerahnya, maka konsekuensinya dia dilengserkan dari jabatannya. Data statistik BKKBN memperlihatkan kesuksesan Soeharto menjalankan program KB sejak 1980.

Tanpa program KB, BKKBN memproyeksi di 2010 penduduk Indonesia mencapai 340 juta. Sedangkan hasil sensus terbaru menyebut, populasi penduduk Indonesia tahun 2010 hanya mencapai 236,7 juta jiwa. Itu berarti, Soeharto mampu memberikan kontribusi menahan 100 juta jiwa kelahiran penduduk baru.

Kegagalan KB disebabkan banyak faktor, antara lain jumlah tenaga kesehatan yang kurang, terutama di daerah yang sulit dijangkau sehingga di daerah tersebut pelayanan KB tidak tercukupi. Tetapi bahkan di kota besar pun, masih banyak kegagalan KB, salah satunya faktor ekonomi. Masyarakat masih tidak tahu bahwa pelayanan KB di puskesmas gratis. Selain itu, program KB yang sudah dicanangkan sejak 1971 saat penduduk Indonesia hanya 70 juta, harus terus digalakkan dengan berbagai upaya. Apalagi KB sangat berkorelasi dengan AKI.

Program KB sendiri berhasil di tahun 1980-an di zaman Soeharto sedangkan di tahun 2012 ke atas semakin merosot karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan program baru yaitu Kampung KB yang mana setiap satu kecamatan harus mempunyai satu Kampung KB. Salah satu Kampung KB berada di Kecamatan Tarakan Utara yang mana di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menurut BPS mencapai 3,8% per tahun, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yang hanya mencapai 1,49% per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk disebabkan dua faktor yakni akibat kelahiran dan migrasi. Dari angka kelahiran tercatat 1,2% jauh di bawah rata-rata nasional, namun yang lebih tinggi adalah diakibatkan migrasi mencapai 2,6% sehingga totalnya mencapai 3,8% per tahun. Di kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, di mana kampung KB dilaksanakan, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dari jumlah

3.234 KK sekitar 556 KK tergolong masyarakat miskin. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan 20 kelurahan lainnya. Kemudian peserta KB juga tergolong sedikit, terutama peserta KB jangka panjang hanya berjumlah 99 akseptor. Mayoritas penduduk kelurahan Juata Laut adalah nelayan. Selain itu, Kampung KB juga ada di Selumit Tarakan Tengah, Gunung Lingkas Tarakan Timur dan Karang Anyar Tarakan Barat.

Menurut Surya Chandra Surapaty, Kampung KB yang telah dibentuk ini agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya Kampung KB, diharapkan manfaat Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah kategori miskin, padat penduduk, terpencil yang tersebar di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB tidak sebatas masalah pembangunan keluarga sejahtera. Namun juga menyangkut pengendalian penduduk dengan tujuan membentuk penduduk yang berkualitas, dengan harapan kedepannya secara perlahan pembangunan SDM dan infrastruktur di desa mulai terwujud.

Kampung KB menjadi inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas KKBPK secara utuh di lini lapangan. Ringkasnya, Kampung KB sebagai miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan mitra kerja lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan Pemerintah terendah.



Kota Tarakan adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, memiliki luas wilayah 250,80 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 406,53 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kota Tarakan ternyata menurut data BPS meningkat setiap tahun, penduduknya tidak linier dengan jumlah peningkatan ekonominya. Semboyan dari Kota Tarakan adalah Tarakan Kota “BAIS” (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera).

Tarakan memiliki posisi yang strategis bagi Pulau Kalimantan, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan wilayah utara Kalimantan, gerbang kedua setelah Kota Balikpapan, selain itu merupakan kota transit perdagangan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti kaitkan dengan beberapa referensi penelitian terdahulu, yang mana menjadikan bahan penting bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian terkait Implementasi Program Kampung KB Dalam Kesejahteraan Keluarga.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maharto (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung KB Menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera di Kabupaten Cirebon. Kondisi program keluarga berencana pasca otonomi daerah nampaknya kurang bergema. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan program kampung keluarga berencana yang merupakan miniatur dari program kependudukan dan keluarga berencana secara keseluruhan, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala. Begitu juga halnya implementasi tentang program kampung keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Cirebon belum terwujud. Beberapa penyebab dan indikasi

yang implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berencana belum efektif diantaranya sarana lingkungan yang kumuh, pencapaian kontrasepsi jangka panjang masih rendah, kegiatan bina keluarga yang belum maksimal, kurangnya evaluasi dan pelaporan serta kurang maksimalnya koordinasi dari instansi terkait, keterbatasan jumlah pengelola/penyuluh, partisipasi masyarakat masih rendah serta keterbatasan sarana pendukung, kurangnya pembinaan terhadap institusi masyarakat, kurangnya sosialisasi keluarga sejahtera, dan respon dari pengelola program belum maksimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang berarti bahwa penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle yaitu faktor *content of policy* dan *context of implementation* lebih banyak berkaitan dengan pelaksana program, kepentingan, manfaat dan sumber daya. Hasil penelitian di Kabupaten Cirebon yang mempunyai kultur dan kondisi wilayah yang berbeda dengan wilayah lain yaitu adanya temuan berupa *novelty* atau pembaruan teori lain yang memperkuat konsep implementasi kebijakan Grindle (1980), bahwa implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Cirebon terwujud,

terdapat faktor/dimensi lain yang mempengaruhi yaitu dimensi sinergitas kelembagaan (*institutional synergies*), kekuatan agama dan budaya (*religious and cultural forces*) serta pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Ketiga dimensi tersebut menurut Peneliti mempunyai pengaruh yang sangat penting dan signifikan.

Implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Cirebon belum terwujud, disebabkan oleh faktor *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi) yang belum maksimal. Strategi yang efektif untuk dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berencana menuju terwujudnya keluarga sejahtera di Kabupaten Cirebon adalah cenderung ke strategi *deversifikasi* atau strategi *ST*, dimana dalam strategi ini menggunakan atau memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi, dengan inovasi menambah program lain supaya tidak jenuh.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yovita Dian Hardianti (2017) yang berjudul Analisis Pola Pertanggungjawaban (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertanggungjawaban pada program kampung KB di DIY yang melibatkan organisasi sektor publik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban laporan. Program kampung KB sebagai wujud program yang berkaitan dengan mitra kerja di BKKBN DIY.



Peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian studi kasus. Metode dan desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan metode deskriptif interpretatif.

Hasil analisis data menunjukkan pelaksanaan program kampung KB melibatkan beberapa instansi pemerintahan. Salah satu pola pertanggungjawaban pada program kampung KB di BKKBN provinsi DIY dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan beberapa kampung KB sebagai laporan kinerjanya, sedangkan untuk laporan yang bersifat keuangan dilaporkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Peneliti memfokuskan Program Kampung KB di kecamatan Tarakan Utara yang mana merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan yang lain. Dengan luas 109,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 43,6% dari luas Kota Tarakan. Dengan adanya perbedaan kepadatan penduduk, maka pola penyebaran penduduk yang terjadi juga mengikuti pola penduduk yang mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Penduduk banyak dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih terbatas. Akan tetapi sejak adanya perbaikan dan perluasan pembangunan ke wilayah Utara Kota Tarakan maka penyebaran penduduk juga sudah mulai terlihat di wilayah tersebut.

Berdasarkan data BPS di Kecamatan Tarakan Utara termasuk daerah miskin dan memiliki banyak anak yang mana mayoritas penduduknya adalah nelayan. Termasuk di Kelurahan Juata Laut terdapat PUS sebanyak 2.403 sedangkan yang memakai KB Baru sekitar 772 dan KB Aktif sebanyak 1.775.

Peneliti disini juga memfokuskan pada tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat di Kecamatan Tarakan Utara dengan adanya program Kampung KB ini, agar terlihat tujuan dari Kampung KB tersebut berhasil atau tidak untuk meningkatkan kualitas hidup dalam keluarga. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti membahas tentang “Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi program kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Tarakan Kec. Tarakan Utara?
2. Faktor apakah yang menghambat dan mendukung dalam proses implementasi program kampung KB di Kota Tarakan Kec. Tarakan Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan implementasi program kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Tarakan Kec. Tarakan Utara.

2. Untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan mendeskripsikan yang menyebabkan terjadinya faktor penghambat dan pendukung di dalam proses implementasi program kampung KB di Kota Tarakan Kec. Tarakan Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan kajian bagi perkembangan disiplin ilmu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
  - b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan kajian implementasi program kampung KB.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Menjadi wahana untuk memperkaya edukasi khususnya masyarakat di Kota Tarakan dalam menerapkan program kampung KB sehingga tujuan kita semua tercapai dalam mengendalikan angka kelahiran di Indonesia khususnya di Kota Tarakan.
  - b. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang program kampung KB yang dicanangkan BKKBN dengan mengendalikan angka kelahiran di Indonesia yang sangat pesat ini.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tentang Implementasi program Kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga maka peneliti menetapkan ruang lingkup sebagai acuan dalam pembahasan penelitian, diantaranya :

1. Kebijakan pemerintah Kota Tarakan dalam program Kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Faktor pendukung dan hambatan dalam proses implementasi program kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

